

## ABSTRAK

Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan semangat dan harapan bagi masyarakat melalui peranan pemerintah Indonesia yang dapat menemukan cara yang lebih cepat dan menarik para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun arbitrase memiliki kelebihan namun pada praktiknya terdapat kelemahan khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Untuk itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahannya adalah Bagaimana akibat hukum apabila terjadi penolakan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Pengelolaan Pasar Andir dan Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian data-data yang diperoleh disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil akhir dari penelitian ini yaitu diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap penolakan putusan arbitrase adalah salah satu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, dalam peraturan prosedur BANI Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia terdiri atas hambatan yuridis meliputi eksekusi yang tidak dapat serta merta dilakukan, masih dimungkinkan upaya hukum lain setelah putusan arbitrase, tidak melaksanakan putusan secara sukarela, dan hambatan teknis yaitu kebiasaan masyarakat karena keengganan untuk melaksanakan putusan arbitrase dan upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, merupakan suatu kebutuhan untuk segera mengadakan perubahan maupun penambahan ketentuan di dalam Undang-Undang Arbitrase khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi, agar lembaga arbitrase khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat melaksanakan putusannya sendiri dengan membentuk perangkat jurusita BANI yang sifatnya lebih independen agar tidak terdapat intervensi dari pihak manapun.

## **ABSTRACT**

*The Indonesian National Arbitration Board is a way of resolving disputes outside of the judiciary, with the enactment of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a spirit and hope for the community through the role of the Indonesian government who can find a faster and more interesting way for business people to resolve disputes. Although the arbitration has an advantage but in practice there is a weakness especially in the execution of the decision. Therefore, the authors interested in conducting this research in order to identify the problem is how the legal consequences in the event of rejection of the decision of the Indonesian National Arbitration Board and any obstacles that occurred in the execution of the decision to execute the National Arbitration Board of Indonesia.*

*The method of study used to answer the problem is with normative method of juridical approach and research specification that is descriptive analytical. The data collection techniques are Library Research by collecting secondary data which is the primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Then the obtained data is arranged systematically, which is subsequently analyzed qualitatively.*

*The final result of this study is derived that the conclusion that the legal consequences of rejection of the arbitral award is one of the interested parties submitting a forced execution request to the Chairman of the District Court. In addition, in the Rules of Procedure BANI Assembly stipulates that there is a deadline for the losing party to implement an arbitral award in which the Tribunal shall determine the sanctions and/or fines and/or interest rates in a reasonable amount if the losing party is negligent in carrying out the ruling the obstacles that occurred in execution of the execution of the ruling of the Indonesian National Arbitration Agency is caused by one of These obstacles consist of juridical barriers of execution that can not necessarily be done, still possible other remedies after the arbitration award, do not execute the ruling voluntarily, and the technical barriers are the customs of the community due to the reluctance to implement the arbitral award and efforts to stalling time as a tactic to not carry out its obligations. Therefore, it is a necessity to immediately make changes and addition stipulated in the Arbitration Act, especially regarding the execution of executions, so that the arbitral institution, especially the Indonesian National Arbitral Board (BANI) can carry out its own decision by establishing a bani bailiff device that is more independent so that there is no intervention from any party.*